



RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR TAHUN 2023

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2024**



GUBERNUR RIAU

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal Nopember 2023
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 630 Nomor 2023);
29. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017

Nomor 12);

30. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);
33. Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 56 Tahun 2020 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau tahun 2022, Nomor 5).
34. Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor : 22)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN
ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Provinsi Riau yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Rancangan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 berjumlah sebesar Rp11.020.380.657.451 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp.	10.061.898.797.594
2. Belanja Daerah	Rp.	11.020.380.657.451
Surplus/(Defisit)	Rp.	(958.481.859.857)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	958.481.859.857
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
Pembiayaan Netto	Rp.	958.481.859.857
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0

Pasal 3

Rancangan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	5.984.937.544.594
b. Pendapatan Transfer	Rp.	4.069.181.213.000
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp.	7.780.040.000

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

a. Pajak Daerah	Rp.	4.382.173.075.085
b. Retribusi Daerah	Rp.	25.970.361.800
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp.	1.097.539.778.218
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp.	479.254.329.491

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;	Rp.	4.069.181.213.000
--	-----	-------------------

b. Pendapatan transfer antar daerah.	Rp.	0
--------------------------------------	-----	---

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah;	Rp.	7.780.040.000
b. Dana darurat;	Rp.	0
Lain-lain pendapatan sesuai dengan		
c. ketentuan peraturan perundang-		
undangan;	Rp.	0

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi;	Rp.	6.427.157.657.615
b. Belanja modal;	Rp.	2.301.179.063.557
c. Belanja tidak terduga; dan	Rp.	40.000.000.000
d. Belanja transfer.	Rp.	2.252.043.936.279

Pasal 6

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai;	Rp.	2.941.863.873.818
b. Belanja barang dan jasa;	Rp.	2.873.273.891.127
c. Belanja hibah;	Rp.	567.889.708.670
d. Belanja bantuan sosial;	Rp.	44.130.184.000

(2) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah;	Rp.	0
b. Belanja modal peralatan dan mesin;	Rp.	301.482.845.635
c. Belanja modal bangunan dan gedung;	Rp.	394.636.053.079
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;	Rp.	1.568.577.600.803
e. Belanja modal aset tetap lainnya;	Rp.	36.214.830.000
f. Belanja Modal Aset Lainnya;	Rp.	267.734.040

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Belanja tidak terduga	Rp.	40.000.000.000
--------------------------	-----	----------------

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil	Rp.	1.794.967.836.279
b. Belanja bantuan keuangan	Rp.	457.076.100.000

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan	Rp.	958.481.859.857
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp.	0

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	Rp.	958.481.859.857
b. Pencairan dana cadangan	Rp.	0
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp.	0
d. Penerimaan pinjaman daerah	Rp.	0

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan	Rp.	0
b. Penyertaan modal daerah	Rp.	0
c. pembayaran cicilan pokok Utang Yang Jatuh Tempo	Rp.	0
d. Pemberian Pinjaman Daerah	Rp.	0

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu menetapkan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Lampiran I | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 2. Lampiran II | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| 3. Lampiran III | Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 4. Lampiran IV | Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; |
| 5. Lampiran V | Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6. Lampiran VI | Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; |
| 7. Lampiran VII | Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD; |
| 8. Lampiran VIII | Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Rancangan APBD; |
| 9. Lampiran IX | Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah |
| 10. Lampiran X | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| 11. Lampiran XI | Daftar Piutang Daerah |
| 12. Lampiran XII | Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; |
| 13. Lampiran XIII | Daftar Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain; |
| 14. Lampiran XIV | Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan; |

- 15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
- 16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal Nopember 2023
GUBERNUR RIAU,

EDY NASUTION

Diundangkan di Pekanbaru pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

S.F. HARIYANTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2023 NOMOR: NOREG
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR:

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor
Tahun Anggaran 2022

DAFTAR ISI
Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau

	Halaman
LAMPIRAN I	1 - 2
LAMPIRAN II	3 - 11
LAMPIRAN III	
1.01.0.00.0.00.01.	DINAS PENDIDIKAN12 - 27
1.02.0.00.0.00.01.	DINAS KESEHATAN28 - 41
1.03.1.04.2.10.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN42 - 57
1.05.0.00.0.00.01.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA58 - 62
1.05.0.00.0.00.02.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH63 - 68
1.06.0.00.0.00.01.	DINAS SOSIAL69 - 79
2.07.3.32.0.00.01.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI80 - 87
2.08.2.14.0.00.01.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA88 - 97
2.09.3.27.0.00.01.	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA98 - 106
2.11.3.28.0.00.01.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN107 - 122
2.13.2.12.0.00.01.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL123 - 131
2.15.0.00.0.00.01.	DINAS PERHUBUNGAN132 - 137
2.16.2.20.2.21.01.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK138 - 144
2.18.0.00.0.00.01.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU145 - 149
2.19.0.00.0.00.01.	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA150 - 156
2.22.0.00.0.00.01.	DINAS KEBUDAYAAN157 - 163
2.23.2.24.0.00.01.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN164 - 169
3.25.0.00.0.00.01.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN170 - 177
3.26.0.00.0.00.01.	DINAS PARIWISATA178 - 184
3.27.0.00.0.00.01.	DINAS PERKEBUNAN185 - 190
3.27.0.00.0.00.02.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN191 - 198
3.29.0.00.0.00.01.	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL199 - 206
3.31.3.30.2.17.01.	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH207 - 218
4.01.0.00.0.00.01.	SEKRETARIAT DAERAH219 - 230
4.02.0.00.0.00.01.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH231 - 237
5.01.5.05.0.00.01.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN238 - 246
5.02.0.00.0.00.01.	BADAN PENDAPATAN DAERAH247 - 253
5.02.0.00.0.00.02.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH254 - 262
5.03.0.00.0.00.01.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH263 - 268
5.04.0.00.0.00.01.	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA269 - 273
5.07.0.00.0.00.01.	BADAN PENGHUBUNG274 - 278
6.01.0.00.0.00.01.	INSPEKTORAT279 - 283
8.01.0.00.0.00.01.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK284 - 290
LAMPIRAN IV	REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN291 - 417
LAMPIRAN V	REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA418 - 422
LAMPIRAN VI	REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM423 - 429
LAMPIRAN VII	SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN APBD430 - 444
LAMPIRAN VIII	SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN APBD445 - 685
LAMPIRAN IX	DAFTAR PERUBAHAN JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN686 - 686
LAMPIRAN X	LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG TELAH DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH687 - 713
LAMPIRAN XI	DAFTAR PINJAMAN DAERAH714 - 714

PROVINSI RIAU

RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.045.832.280.228	4.014.678.028.946	(31.154.251.282)	1 %
4.1.01	Pajak Daerah	3.392.086.798.388	3.312.414.331.190	(79.672.467.198)	2 %
4.1.02	Retribusi Daerah	21.517.055.000	17.215.784.040	(4.301.270.960)	20 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	128.158.256.355	117.402.606.804	(10.755.649.551)	8 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	504.070.170.485	567.645.306.912	63.575.136.427	13 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	4.983.665.522.101	5.166.277.886.478	182.612.364.377	4 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.983.665.522.101	5.166.277.886.478	182.612.364.377	4 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.251.000.000	2.735.000.000	(516.000.000)	16 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.251.000.000	2.735.000.000	(516.000.000)	16 %
	Jumlah Pendapatan	9.032.748.802.329	9.183.690.915.424	150.942.113.095	2 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	6.293.561.786.105	6.547.992.038.289	254.430.252.184	4 %
5.1.01	Belanja Pegawai	2.380.014.876.804	2.316.900.442.067	(63.114.434.737)	3 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.438.014.768.039	2.710.621.391.797	272.606.623.758	11 %
5.1.05	Belanja Hibah	1.435.050.331.262	1.458.940.674.425	23.890.343.163	2 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	40.481.810.000	61.529.530.000	21.047.720.000	52 %
5.2	BELANJA MODAL	979.270.772.748	1.226.588.385.434	247.317.612.686	25 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	112.132.178	801.982.178	689.850.000	615 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	201.417.479.525	335.676.736.221	134.259.256.696	67 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	217.228.326.704	280.525.464.255	63.297.137.551	29 %

5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	529.988.725.248	577.701.191.645	47.712.466.397	9 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	30.524.109.093	31.883.011.135	1.358.902.042	4 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	66.068.200.583	48.134.951.429	(17.933.249.154)	27 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	66.068.200.583	48.134.951.429	(17.933.249.154)	27 %
5.4	BELANJA TRANSFER	1.793.848.042.893	1.867.659.529.718	73.811.486.825	4 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.382.868.542.893	1.487.308.892.718	104.440.349.825	8 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	410.979.500.000	380.350.637.000	(30.628.863.000)	7 %
	Jumlah Belanja	9.132.748.802.329	9.690.374.904.870	557.626.102.541	6 %
	Total Surplus/(Defisit)	(100.000.000.000)	(506.683.989.446)	(406.683.989.446)	-407 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	100.000.000.000	531.683.989.446	431.683.989.446	432 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	100.000.000.000	531.683.989.446	431.683.989.446	432 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	100.000.000.000	531.683.989.446	431.683.989.446	432 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	25.000.000.000	25.000.000.000	100 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	25.000.000.000	25.000.000.000	100 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	25.000.000.000	25.000.000.000	100 %
	Pembiayaan Netto	100.000.000.000	506.683.989.446	406.683.989.446	407 %

Pekanbaru, September 2022
Gubernur Riau

SYAMSUAR



PROVINSI RIAU

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.984.937.544.594,00
4.1.01	Pajak Daerah	4.382.173.075.085,00
4.1.02	Retribusi Daerah	25.970.361.800,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.097.539.778.218,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	479.254.329.491,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	4.069.181.213.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.069.181.213.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.780.040.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.780.040.000,00
	Jumlah Pendapatan	10.061.898.797.594,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	6.427.157.657.615,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.941.863.873.818,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.873.273.891.127,00
5.1.05	Belanja Hibah	567.889.708.670,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	44.130.184.000,00
5.2	BELANJA MODAL	2.301.179.063.557,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	301.482.845.635,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	394.636.053.079,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.568.577.600.803,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	36.214.830.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	267.734.040,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	40.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	40.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	2.252.043.936.279,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.794.967.836.279,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	457.076.100.000,00
	Jumlah Belanja	11.020.380.657.451,00
	Total Surplus/(Defisit)	-958.481.859.857,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	958.481.859.857,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	958.481.859.857,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Pembiayaan Netto	958.481.859.857,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Provinsi Riau,

Gubernur

EDY NASUTION



PROVINSI RIAU
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	380.739.289.491,00	4.184.893.805.654,00	2.174.344.935.720,00	0,00	0,00	6.359.238.741.374,00
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	3.944.720.000,00	2.445.355.290.148,00	427.869.620.821,00	0,00	0,00	2.873.224.910.969,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN	3.944.720.000,00	2.440.470.605.131,00	420.563.470.015,00	0,00	0,00	2.861.034.075.146,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0001	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I	0,00	1.294.424.150,00	1.832.217.856,00	0,00	0,00	3.126.642.006,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0002	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II	0,00	1.131.738.583,00	1.842.062.150,00	0,00	0,00	2.973.800.733,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0003	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III	0,00	1.283.685.401,00	1.796.463.300,00	0,00	0,00	3.080.148.701,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0004	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV	0,00	1.174.836.883,00	1.835.407.500,00	0,00	0,00	3.010.244.383,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	370.438.409.491,00	1.059.911.435.274,00	123.147.471.889,00	0,00	0,00	1.183.058.907.163,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	2.906.000.000,00	357.357.359.371,00	1.099.861.004,00	0,00	0,00	358.457.220.375,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD	308.862.721.748,00	523.731.966.461,00	82.620.067.770,00	0,00	0,00	606.352.034.231,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	UPT. RUMAH SAKIT Jiwa TAMPAN	32.469.887.914,00	92.794.464.109,00	25.214.446.311,00	0,00	0,00	118.008.910.420,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI	26.199.799.829,00	75.584.303.565,00	13.172.643.735,00	0,00	0,00	88.756.947.300,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	UPT. BALAI PELATIHAN KESEHATAN	0,00	439.318.138,00	1.040.453.069,00	0,00	0,00	1.479.771.207,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	UPT. LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN	0,00	2.490.126.367,00	0,00	0,00	0,00	2.490.126.367,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	UPT. INSTALASI FARMASI DAN LOGISTIK KESEHATAN	0,00	7.513.897.263,00	0,00	0,00	0,00	7.513.897.263,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
52	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	DINAS KEBUDAYAAN	2.253.619.187,00	0,00	0,00	0,00	2.253.619.187,00
53	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	UPT. MUSEUM SANG NILA UTAMA DAN TAMAN BUDAYA	629.999.896,00	0,00	0,00	0,00	629.999.896,00
TOTAL				284.238.546.793,00	55.746.872.500,00	0,00	0,00	339.985.419.293,00

Provinsi Riau,

Gubernur

EDY NASUTION